

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SUB SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI ERA GLOBAL

Moh. Miftachul Choiri dan Aries Fitriani

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

email: miftahch@yahoo.com.

Abstract: *A globalization, which looks like both sides of one coin, has both positive and negative impacts. The globalization inspired not only by capitalism but also by pragmatism has practically affected the education in Indonesia. The roles of education become practically unfamiliar and faraway from society needs. The globalization takes some issues such as competence, standardization, and commerce. To face this era, what should Islamic education do as sub-system of national education? The Islamic school (madrasah) as a sub-system of Islamic education in Indonesia, had extremely strong experienced to face the challenges at the last era of Dutch colonialism. The fact that madrasah had not only an autonomy but also an intellectual resources had proven that it could fulfill the needs of Islamic community. These are cultural potencies which should be kept and not be abandoned for the sake of globalization interest. The globalization as a cultural transformation process affects the world, especially the practice of education in Indonesia. All people using science and technology can easily access the global culture. The global culture which is value-free should be faced by transformation of values of which Islamic scholars had transformed in pesantren (Islamic boarding schools) and Islamic schools (madrasah). In other word, both pesantren and madrasah should not be entrapped in capitalism ideology and could serve all people. It is because the paradigm of Islamic education differs from that of both capitalism and pragmatism. The article tries to elaborate how Islamic education in Indonesia especially madrasah should be positioned in the global era*

المخلص: مثل العولمة كمثل نقود ذوي الوجهين التي تحضر الإيجابية والسلبية. والعولمة التي تكون نتيجة الرأسمالية والذرائعية تؤثر كثيرا على التربويين بإندونيسيا، بظهورها كان التربويون يتعدون عن تحقيق دور التربية لسد حاجات الأمة، يعني تركية نفوس الأمة، الأمور التي تحملها العولمة هي الكفاءة والتسوية و تجارية التربية، ولمواجهة هذه التحديات فمادما سيفقوم علماء التربية الإسلامية كنوع عملية التربية الوطنية، والمدرسة من عناصر التربية الإسلامية بإندونيسيا لها تجربة قوية لمواجهة التغيرات في عصر هولندا، التجربة التاريخية المؤسسة على الظاهر أن للمدرسة اعتمادا على النفس القوي والثقافة العلمية المؤسسة على حاجات المسلم من الثقافات التي يلزم أن يحفظها كل حتى لا تؤثرها العولمة، وتأتي العولمة بوجودها في جميع النواحي وكذلك في نفوس التربويين بإندونيسيا، إن تنمية العلوم والتكنولوجيا تساعد الثقافة العالمية بحيث يستطيع كل أن يشاهدها وينتفع منها، فلذلك، أن تأتي الثقافة العالمية الخالية من القيم بتوصيل القيم التي يرثها العلماء بوسيلة المعاهد والمدارس، وقصارى القول، ألا يحجر المعهد والمدرسة في آراء الرأسمالية ويبعد عن الرأسماليين، فمادما يجب على التربويين أن يقوموا بهذا؟ لأن للتربية الإسلامية وجهة تخالف بوجهة الرأسمالية والذرائعية. وستبحث هذه المقالة الوضعية في دور التربية الإسلامية بإندونيسيا أي المدرسة في مواجهة عصر العولمة.

Keywords: Pendidikan Islam, Madrasah, Sistem Pendidikan Nasional dan Globalisasi

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam Indonesia secara historis telah memiliki pengalaman bagaimana harus tetap bertahan dalam himpitan arus modernisasi yang kuat tanpa harus kehilangan identitas. Wujud nyata dari pengalaman tersebut adalah adanya upaya untuk mereformasi sistem pendidikan Islam sebagai jawaban atas tantangan kolonialisme dan ekspansi Kristen.¹ Sistem pendidikan Islam yang pada awalnya berbentuk surau² dan pesantren,³ menjelma menjadi dua bentuk lembaga pendidikan Islam modern: pertama, sekolah-sekolah model Belanda tetapi diberi muatan pengajaran Islam,⁴ dan kedua, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda.⁵

¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Ciputat: Logos, 2000), 99.

²Surau merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang banyak berkembang di daerah Minangkabau Sumatera.

³Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa.

⁴Contohnya, Sekolah Adabiyah yang didirikan Abdullah Ahmad di Padang pada tahun 1909 dan sekolah-sekolah Islam yang didirikan Ormas Muhammadiyah.

⁵Contohnya, Sekolah Diniyyah yang didirikan oleh Zainuddin Labay El-Yunusi, madrasah-madrasah yang didirikan oleh organisasi al-Irsyad atau pesantren Mambaul Ulum di Surakarta.

Menurut Karel A. Steenbrink,⁶ perubahan pola yang ditempuh oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada saat itu, merupakan bentuk reformasi sistem pendidikan Islam dalam merespon model pendidikan Belanda karena adanya resistensi sistem pendidikan yang dikembangkan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam. Pemerintah Belanda mengkotegorikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebagai sekolah liar.⁷ Bahkan untuk membatasi dan menekan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1933 mengeluarkan peraturan yang terkenal dengan *wilde scholen ordonantie*.⁸ Akibat perlakuan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda, lembaga-lembaga pendidikan Islam mengalami kesulitan berkembang dan cenderung tertutup untuk menerima pemikiran yang datang dari luar tradisi Islam dan pesantren. Namun disisi lain, perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap lembaga pendidikan Islam pada saat itu justru mendorong masyarakat Islam untuk berbondong-bondong mendirikan lembaga pendidikan Islam. Mereka memiliki keyakinan dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam dapat digunakan sebagai tempat untuk mentransformasikan ajaran-ajaran Islam sambil melakukan perlawanan terhadap dominasi pemerintah kolonial Belanda.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan dinamika yang berkembang dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam kini mendapatkan pengakuan yang sama sebagai bagian dari sub sistem pendidikan Nasional. Pengakuan tersebut ditandai dengan lahirnya SKB (Surat Keputusan Bersama tiga menteri) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975.⁹ Ditegaskan oleh Malik Fadjar,¹⁰ lahirnya SKB tiga menteri tersebut sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu lembaga

⁶Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994), 7.

⁷Pelabelan “sekolah liar” sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memarjinalkan lembaga-lembaga pendidikan Islam.

⁸H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Bandung: Rineka Cipta, 2004), 169.

⁹Fatah Syukur, “Madrasah di Indonesia: Dinamika, Kontinuitas dan Problematika” dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (ed.) Ismail SM et al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 243.

¹⁰A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998).

pendidikan Islam dari berbagai perspektif: baik status, mutu lulusan, mutu proses maupun keberadaan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional.

Pengakuan lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional saat ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Sebagai sebuah peluang, karena secara yuridis keberadaan lembaga pendidikan Islam telah diakui keberadaannya, sehingga eksistensinya sangat ditentukan oleh kualitas lulusan yang dihasilkan dan sejauhmana ekseabilitas lulusannya dapat diterima oleh masyarakat dan dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah tantangan, karena saat ini sistem pendidikan nasional dihadapkan pada persoalan tentang pentingnya standarisasi mutu pendidikan dalam era global, sehingga lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional dituntut merespon kondisi ini.

Namun demikian persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah menyikapi hal tersebut? Menurut Azyumardi Azra,¹¹ terdapat persoalan berat yang mendesak untuk diselesaikan para pemikir dan praktisi pendidikan Islam terkait dengan madrasah, yakni menyangkut “identitas atau distingsi” Islam pada era globalisasi. Karena madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, belum secara nyata memiliki kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran dan desain kurikulumnya. Sehingga pelabelan lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, tidak hanya sekedar diukur dari adanya mushola dan masjid di lingkungan madrasah atau dibacakannya doa “*basmalah*” sebelum kegiatan pembelajaran di mulai. Lebih dari itu, untuk mempertegas madrasah sebagai lembaga pendidikan umum yang berciri khas Islam, perlu rumusan yang secara epistemologis dan aksiologis jelas. Paradigma pengembangan kurikulum yang dikembangkan madrasah harus jelas, pengembangan nilai-nilai pesantren sebagai induk semang madrasah yang relevan tetap dikembangkan di madrasah. Karena madrasah lahir sebagai lembaga konservasi nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan. Namun di sisi lain, madrasah dituntut untuk mengikuti berbagai kebijakan yang didesain

¹¹Sebagaimana dikutip dalam tulisan Fatah Syukur, *Madrasah di Indonesia*, 255.

Pemerintah sebagai regulasi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Berbagai problem nyata tersebut sekarang sedang dihadapi madrasah. Tanpa ada pemecahan konseptual dan pendekatan secara pragmatis, cepat atau lambat, madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional akan kehilangan jati dirinya, terlebih ketika berhadapan dengan dinamika global yang semakin laten dan serius.

ORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM: ANTARA PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN DAN DORONGAN MEMENUHI KEBUTUHAN PASAR

Pendidikan semestinya dijadikan sebagai upaya untuk menjadikan manusia lebih bermartabat dan dijadikan sarana untuk menyadarkan manusia akan arti penting nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, menurut Sudarwan Danim¹² agenda utama pendidikan adalah proses memanusiakan manusia menjadi manusia. Proses pemanusiaan tersebut dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong tumbuh kembangnya kesadaran nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya melalui pendidikan agama. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dijelaskan bahwa sebagai agenda proses kemanusiaan dan pemanusiaan, pendidikan dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu: *pertama*, sebagai proses pendewasaan peserta didik untuk hidup pada alam demokrasi dan, *kedua*, sebagai proses penyiapan peserta didik memasuki sektor ekonomi produktif. Memosisikan pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan peserta didik memasuki wilayah ekonomi produktif merupakan hal semu, karena proses pembelajaran di sekolah tidak mendorong terbentuknya semangat dan kesadaran peserta didik tentang arti penting kemandirian dan keterampilan dalam menghadapi kehidupan nyata. Sementara itu dunia industri menuntut profil lulusan pendidikan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai akibatnya banyak dunia pendidikan di Indonesia yang berpikir secara pragmatis dengan mengikuti logika “kapitalisme” dan mengabaikan pentingnya membangun kesadaran yang humanis.

¹²Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

John Dewey dalam bukunya *Democracy and Education* menjelaskan bahwa tidak pada tempatnya mengaitkan tatanan prilaku kelembagaan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, mengingat pendidikan bertujuan meneruskan cita-cita demokrasi. Menurut John Dewey, agenda utama pendidikan secara fungsional adalah membentuk komunitas-komunitas sosial ideal sebagai bagian dari proses tranformasi pendewasaan peserta didik, apapun bentuk dan ragam pendidikan itu dikemas.

Sejalan dengan gagasan John Dewey, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam konteks ini, tidak seharusnya praksis pendidikan di Indonesia tersandera terlalu dalam pada logika kapitalisme yang lebih mengedepankan aspek ekonomi ketimbang nilai-nilai kemanusiaan. Siapa yang mempunyai “duit” dapat “membeli” dan mempengaruhi hasil belajar yang bersifat kognitif. Sementara perubahan hasil belajar yang bersifat afektif yang berhubungan dengan perubahan kepribadian cenderung diabaikan. Penerapan standar penilaian yang jujur dan berkeadilan sebenarnya dapat memberikan pelajaran yang berharga pada peserta didik bahwa pencapaian prestasi yang bersifat akademik bukan segala-galanya. Lebih dari itu penerapan prinsip-prinsip penilaian, seperti kejujuran dan kemandirian merupakan nilai-nilai yang penting diterapkan dalam praksis pendidikan di lingkungan pendidikan Islam dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik.

Oleh karena itu, kehadiran pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional menjadi penting untuk mendorong terwujudnya manusia Indonesia yang mempunyai kekuatan spiritual, kepribadian dan memiliki ketrampilan yang dibutuhkan masyarakat. Lickona¹³ menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pendidikan agama yang efektif bagi peserta didik diperlukan

¹³Sebagaimana dikutip dalam Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), VII.

tiga hal: *pertama*, *moral knowing*, meliputi: *moral awareness*, *knowing moral values*, *perspective-taking*, *moral reasoning*, *desicion making* dan *self-knowledge*; *kedua*, meliputi: *conscience*, *self-esteem*, *empathy*, *loving the good*, *self control*, dan *humanity*; dan *ketiga*, *Moral action*, meliputi: *competence*, *will* dan *habit*. Disamping tiga hal tersebut, Muhaimin¹⁴ menambahkan pentingnya suasana religius dan kontrol sosial yang kuat di madrasah untuk mewujudkan pembelajaran agama yang efektif.

Praxis pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk di dalamnya pembelajaran PAI di madrasah saat ini dalam soroton, bahkan tidak sedikit para pakar pendidikan yang menyebut praxis pendidikan agama Islam telah gagal¹⁵ menjalankan perannya dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kepribadian Islami. Menurut Suyata, salah satu penyebab gagalnya pendidikan agama dalam menjalankan misi utamanya adalah karena pembelajaran agama terpisah dari konteksnya. Orang menghayati agama dengan baik ketika berada dalam tempat-tempat beribadah. Pembelajaran agama terlalu normatif dan tekstual, mengabaikan aspek kontekstualnya sehingga praxis beragama tidak dapat menyadarkan penganutnya dari kebobrokan moral yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan. Lebih dari itu, Mochtar Buchori¹⁶ menambahkan kegagalan pembelajaran agama disebabkan praktik pendidikan hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volitif, yakni kemauan dan tekak untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Sebagai akibatnya nampak kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan. Fakta ini diamini oleh Menteri Agama RI, Muhammad Maftuh Basuni¹⁷ bahwa pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung lebih mengedepankan aspek kognitif (pemikiran) daripada afektif (rasa) dan psikomotorik (tingkah laku).

¹⁴*Ibid.*, VIII.

¹⁵Salah satu pakar pendidikan yang menyebut pendidikan agama gagal menjalankan misi utamanya adalah Mochtar Buchori.

¹⁶Mochtar Buchori, "Posisi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Umum," Makalah, pada Seminar Nasional di IKIP Malang, 24 Februari, 1992

¹⁷Muhammad Maftuh Basuni, "Pendidikan Agama Belum Capai Tujuan", *Tempo*, 24 November 2004.

Dari berbagai sorotan yang dikemukakan para pakar pendidikan tersebut, nampak bahwa problem pembelajaran agama terletak pada persoalan bagaimana membelajarkan agama tidak sebatas pada aspek pengetahuan tetapi juga penjiwaan dan pengamalan. Dalam konteks bagaimana membelajarkan agama Islam yang utuh, Abdurrahman Mas'ud¹⁸ menjelaskan bahwa pendidikan Islam pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai ragam transformasi budaya Islam–Jawa melalui *modelling* yang didemonstrasikan oleh para Walisongo. Melalui cerita pewayangan, Walisongo mempersonifikasikan para *awliya* (kekasih Allah) dan para kyai yang sarat dengan pesan-pesan moral dan kesalehan yang relevan dengan budaya lokal. Kesederhanaan, tidak tamak, mengedepankan kepentingan masyarakat dan orang banyak merupakan warisan nilai-nilai luhur yang ditransformasikan oleh Walisongo dan para santrinya. Dalam sebuah rumusan naskah Islam Jawa Klasik misalnya, terdapat ungkapan “*arep atatakena elmu, sakadare den lampahaken* (carilah ilmu yang bisa engkau praktekkan, terapkan).¹⁹ Tentu ungkapan ini mengandung pesan bijak pentingnya belajar ilmu agama Islam yang kemudian diikuti dengan pengamalan. Konsep ilmu yang operasional sudah dikenal sejak dulu dalam tradisi intelektual Islam. Namun demikian, saat sekarang ada kesan praksis pendidikan Islam di madrasah seolah kehilangan akar sejarahnya, khususnya tradisi pesantren yang unik. Dalam tantangan global, kegigihan dalam mempertahankan prinsip-prinsip luhur serta nilai-nilai yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan perlu mendapatkan perhatian khusus, karena masyarakat yang gigih dan mempunyai prinsipilah yang dapat bertahan menghadapi gempuran budaya global semakin mengenyahkan nilai-nilai kemanusiaan.

PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DALAM DINAMIKA PERUBAHAN

Tidak berlebihan, jika terdapat satu ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan Islam Indonesia telah memberikan warna dan kontribusi

¹⁸Abdurrahman Mas'ud, “Sejarah dan Budaya Pesantren” dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (ed.) Ismail SM, et. al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 29.

¹⁹G.W.J. Drewes, *An Early Javanese Code of Muslim Ethics* (The Hague: KITL V Nijhoff Bibliotheca Indonesia, 1978), 19.

terhadap sistem pendidikan nasional. Sjafrin Sairin²⁰ menegaskan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia dari masa penjajahan sampai masa kini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Terjadinya dinamika perubahan dalam sistem pendidikan Islam sejak masa penjajahan hingga kini, menunjukkan indikasi yang kuat bahwa pendidikan Islam dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Perubahan tersebut juga menggambarkan bahwa komunitas muslim dapat melakukan pembauran dalam sistem pendidikan Islam yang mereka geluti dengan dinamika yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.

Walaupun demikian, terdapat hal yang menarik dicermati terkait bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan. Menurut Azyumardi Azra²¹ para eksponen lembaga-lembaga pendidikan Islam terlihat tidak terlalu tergesa-gesa mentransformasikan perubahan kelembagaan Islam, tetapi cenderung mempertahankan kebijaksanaan yang penuh kehati-hatian, mereka menerima pembaharuan atau modernisasi secara terbatas tanpa harus melakukan perubahan sistem pendidikan Islam secara menyeluruh. Karena sesungguhnya praksis pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan Islam memiliki keunikan dan ciri khas, yang secara sosiologis dan filosofis tentu berbeda-beda sesuai dengan tradisi dan disiplin keilmuan yang dikembangkan para pendirinya.

Menurut Affandi Mochtar²² pendidikan Islam Indonesia, telah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan Sistem Pendidikan Nasional. Pesantren sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam Indonesia diasumsikan dapat menjembatani problem komunikasi antara pemerintah dengan lapisan masyarakat bawah, karena hampir sebegini besar pesantren di Indonesia, tumbuh dan berkembang dari lapisan bawah masyarakat. Kini sebegini besar pesantren lebih terbuka untuk menerima arus modernisasi. Indikasi ini nampak dari adanya berbagai kegiatan yang mendorong

²⁰Sjafrin Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Prespektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 35.

²¹Azyumardi Azra, "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan" dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), xvi.

²²Affandi Mochtar, *Membedah Diskursus Pendidikan Islam* (Ciputat: Kalimah, 2001), 77-82.

partisipasi pesantren dalam pembangunan. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang lainnya kini sangat terbuka dengan berbagai temuan yang dihasilkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada umumnya perlu melakukan telaah secara kritis agar hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Bukan sebaliknya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa malapetaka bagi eksistensi kehidupan manusia, karena dihegemoni oleh cara berfikir kapitalis dan liberalis yang bebas nilai.

MADRASAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional, bukan semata-mata karena faktor jumlah peserta didiknya yang signifikan tetapi juga karakteristik madrasah yang relevan dengan semangat reformasi sistem pendidikan nasional. Di tengah-tengah upaya pemerintah menggulirkan kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, madrasah sudah sangat terbiasa dengan esensi kebijakan tersebut. Karena kebanyakan madrasah lahir dari masyarakat (swasta) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama anak-anak mereka.²³ Kemandirian madrasah dapat diamati semenjak masa penjajahan kolonial Belanda dan pemerintahan Orde Baru, dengan membatasi diri untuk tidak bersedia menerima subsidi atau menggantungkan diri kepada pemerintah.²⁴

Dalam sejarah perkembangannya yang panjang, madrasah memiliki banyak hal yang positif dan negatif. Sisi positif madrasah, di antaranya adalah lembaga pendidikan ini lahir dari masyarakat bawah dan terbiasa mandiri. Dilihat dari falsafah pendidikan yang dianut kebanyakan madrasah di Indonesia, lembaga ini dipersiapkan sebagai lembaga konservasi nilai-nilai luhur yang dikembangkan para pendahulunya. Kesederhanaan, kemandirian, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan

²³Abdul Wahid, "Manajemen Berbasis Madrasah: Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (ed.) Ismail SM et.al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 267.

²⁴H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Bandung: Rineka Cipta, 2004), 80.

pribadi, kebersamaan, menghargai orang lain dan berpegang pada tradisi terdahulu merupakan nilai-nilai luhur yang dikembangkan di kebanyakan madrasah. Transformasi nilai-nilai luhur yang demikian tentu menjadi hal yang penting ketika terjadi gempuran nilai-nilai global yang semakin individual dan liberal.

Selain mempunyai sisi positif, madrasah juga memiliki sisi negatif, antara lain adalah berkembangnya sikap ortodoksi yang ditunjukkan sebagian besar madrasah akibat adanya perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah kolonial dan Orde Baru. Sikap yang demikian ternyata tidak mudah dibongkar karena sebagian pengurus dan tenaga pendidik di madrasah saat ini, masih diisi kelompok yang secara historis pernah mendapat perlakuan diskriminatif tersebut. Sehingga sikap ortodoks sudah terlanjur terbentuk dalam *mindset* mereka. Sesuatu yang berasal dari luar madrasah ditanggapi secara apatis sehingga melahirkan sikap *defense mechanism*.²⁵ Sikap apatisisme yang berlebihan menyebabkan isolasi dan menolak perubahan. Akibat sikap tersebut perkembangan madrasah dalam merespon berbagai kebijakan pemerintah terutama terkait dengan kebijakan mutu pendidikan menjadi lamban. Proses pembelajaran berjalan apa adanya sesuai dengan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.²⁶ Isi pendidikan di madrasah secara umum masih lebih mengutamakan penguasaan materi-materi keagamaan yang bersifat tekstual dan kurang aplikatif ketimbang materi-materi keagamaan yang kontekstual. Struktur kurikulum yang dikembangkan di madrasah juga sangat padat, sehingga terkesan kurang spesifik. Akibatnya banyak lulusan madrasah yang kualitas keilmuannya diragukan. Dan tidak jarang sebagian masyarakat menganggap lulusan madrasah dengan label yang kurang baik. Sebagai lulusan institusi yang membidangi agama Islam, penguasaan ilmu keislaman belum dapat memenuhi kebutuhan minimal masyarakat. Sebagai lulusan lembaga pendidikan formal, penguasaan terhadap teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan juga dipertanyakan. Oleh sebab itu,

²⁵Tilaar, *Paradigma Baru*, 153.

²⁶Guru-guru di madrasah banyak yang mengajar lebih dari satu bidang studi. Bidang studi tersebut secara keilmuan kadang serumpun kadang di luar rumpun. Yang menjadi persoalan ketika seorang guru mengajar lebih dari satu bidang studi dan bidang studi tersebut bukan keahliannya, dapat dipastikan proses pembelajaran tidak dapat berjalan efektif.

madrasah sebagai pendidikan yang berciri khas agama Islam, dituntut untuk memperjelas identitas dirinya dengan melakukan berbagai perbaikan.

PROBLEM ESENSIAL MADRASAH SEBAGAI INSTITUSI ISLAM DALAM ERA GLOBAL

Terdapat tiga masalah mendasar yang dihadapi madrasah saat ini,²⁷ antara lain: *pertama*, masalah identitas madrasah.²⁸ Masalah ini bersumber dari respon madrasah terhadap realitas yang berkembang di masyarakat. Realitas masyarakat Indonesia saat ini, sedang dalam masa transisi sebagai dampak terjadinya proses reformasi. Persoalan demokrasi, hak asasi manusia, pluralitas, kebebasan pers dan globalisasi menjadi isu utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sementara itu, realitas yang berkembang di madrasah pada umumnya lamban dalam merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat. *Kedua*, masalah sumberdaya manusia internal madrasah dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah ke depan. Mayoritas sumberdaya manusia yang dimiliki madrasah homogen, lulusan perguruan tinggi Islam, kecenderungannya memiliki disiplin keilmuan yang sama. Sehingga pengembangan madrasah menjadi kurang dinamis dan inovatif. Dilihat dari struktur keilmuan yang dikembangkan di madrasah, sudah saatnya keahlian, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan utama dalam melakukan rekrutmen tenaga pendidik di madrasah. Tentu selain beberapa pertimbangan tersebut, para guru juga harus dikenalkan dengan tradisi madrasah sebagai institusi Islam yang dekat dengan tradisi pesantren. Sehingga nilai-nilai pesantren tidak diabaikan. *Ketiga*, masalah pengelolaan madrasah. Menurut H.A.R. Tilaar, persoalan madrasah terletak dari keunikannya bahwa madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri.²⁹ Dalam pertumbuhannya tersebut, madrasah lahir dari komunitas masyarakat yang secara ekonomi

²⁷KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 278-279.

²⁸Perlu diingat bahwa kelahiran madrasah di Indonesia merupakan bentuk modernisasi sistem pendidikan tradisional Islam yang berbentuk surau dan pesantren. Oleh sebab itu, seharusnya madrasah harus berpijak kepada nilai-nilai yang dikembangkan oleh model pendidikan tradisional Islam yang relevan, sehingga model tersebut tidak perlu ditinggalkan sepenuhnya.

²⁹Tilaar, *Paradigma Baru*, 153.

berasal dari keluarga tidak mampu, tentu kondisi tersebut menimbulkan situasi serba sulit bagi madrasah. Pengelolaan madrasah yang berorientasi kepada masyarakat telah melahirkan keanekaragaman pengelolaan sehingga sulit untuk dicarikan standar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menghadapi tuntutan modernisasi dan globalisasi karena standar-standar tertentu diperlukan maka pengelolaan pendidikan di madrasah perlu disesuaikan agar lebih peka dalam menyikapi kehidupan global yang penuh persaingan.

Terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang relevan dan bermutu merupakan faktor penentu keberhasilan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Karena itu, para pendiri Republik Indonesia menetapkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.³⁰ Dalam era globalisasi ini, sistem pendidikan nasional Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan berat yang menuntut untuk dipecahkan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain: persoalan pemerataan, mutu pendidikan, relevansi dan efisiensi.³¹

Sementara itu, menurut H.A.R. Tilaar terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan sistem pendidikan nasional. Indikator tersebut antara lain popularisasi pendidikan, sistematisasi pendidikan, proliferasi pendidikan dan politisasi pendidikan.³² Isu utama dalam popularisasi pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua orang yang populer dengan gerakan *Education for All*.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi ada kecenderungan beberapa pihak, khususnya pemangku kebijakan pendidikan melahirkan sikap arogansi dengan lahirnya sekolah unggulan, yang secara faktual hanya diperuntukkan bagi kaum elit di masyarakat. Fakta ini nampaknya tidak dapat dipisahkan dengan adanya upaya sebagian pihak untuk melakukan komersialisasi pendidikan dengan berlindung di balik upaya

³⁰Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas, 2008), 78-79.

³¹Suyanto, *Reformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Komite Reformasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), 4.

³²Tilaar, *Paradigma Baru*, 64.

peningkatan mutu pendidikan. Padahal secara yuridis, pemerintah menjamin pembiayaan lembaga pendidikan melalui berbagai kebijakan, antara lain: pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dana alokasi khusus untuk peningkatan mutu pendidikan, dana yang disusun melalui RAPBS, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, sebenarnya madrasah jauh memiliki peran yang lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Karena hampir sebagian peserta didik yang tidak tertampung di sekolah-sekolah, pada akhirnya memilih madrasah sebagai tempat belajar. Terlepas dari persoalan adanya dugaan dan kecurigaan sebagian pihak yang mengatakan bahwa proses pendidikan di madrasah tidak bermutu dan input pendidikannya rendah, namun kesediaan madrasah untuk menerima anggota masyarakat turut dalam proses pembelajaran merupakan poin penting dalam mewujudkan gerakan *education for all*.

Indikator kedua tentang perkembangan sistem pendidikan nasional adalah sistematisasi pendidikan. Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan yang menyertainya merupakan upaya pemerintah untuk menyeragamkan praktek pendidikan di Indonesia agar menghasilkan perencanaan dan manajemen pendidikan yang efisien, memudahkan supervisi, mewujudkan kesatuan bangsa dan memudahkan pengontrolan mutu pendidikan secara nasional. Fakta yang terjadi justru sebaliknya, sistem pendidikan nasional yang kaku, menutup pintu bagi lahirnya inovasi-inovasi dan eksperimen-eksperimen konsep pendidikan. Pendidikan swasta yang menjadi pilar pendidikan nasional, ruang geraknya dibatasi karena adanya berbagai regulasi yang mengatur praksis pendidikan, terutama terkait dengan kebijakan implementasi standar nasional pendidikan.

Indikator ketiga tentang perkembangan sistem pendidikan nasional adalah proliferasi pendidikan. Keberlangsungan pendidikan dalam suatu bangsa sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama tri pusat pendidikan. Bukan monopoli lembaga pendidikan formal. Sejalan dengan perkembangan arus modernisasi, nampaknya dunia usaha dan industri mempersyaratkan adanya kepemilikan ijazah sebagai syarat untuk memasuki dunia usaha dan industri. Sehingga ukuran seseorang layak diterima di sebuah perusahaan dan industri dilihat dari kepemilikan ijazah.

Sementara itu, lembaga yang berhak mengeluarkan ijazah adalah lembaga pendidikan formal. Hal yang demikian sebenarnya juga ada sisi positifnya, namun juga melahirkan sisi negatif, karena mengabaikan aspek ketrampilan dan kepribadian. Banyak dari mereka yang memiliki ijazah pendidikan formal tetapi tidak memiliki ketrampilan dan kepribadian.

Kepentingan masyarakat cenderung diabaikan, karena pendekatan informal yang membentuk peserta didik tidak diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi karakter peserta didik. Makna pendidikan dipersempit pada aspek *schooling*. Institusi pendidikan dianggap sebagai tempat untuk memproduksi peserta didik. Perkembangan kepribadian dan pembentukan karakter menjadi hal yang kurang diperhatikan. Berbeda dengan institusi pendidikan pada umumnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, lebih peduli terhadap perkembangan kepribadian dan akhlak mulia. Sekalipun banyak sorotan yang dialamatkan kepada madrasah karena dianggap gagal menjalankan perannya sebagai lembaga formal Islam. Namun demikian upaya madrasah untuk memberikan pengalaman hidup beragama secara nyata kepada peserta didiknya cukup dijadikan indikator, bahwa pembelajaran di madrasah mempunyai perhatian yang kuat terhadap pembentukan kepribadian tetapi kurang memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tanggungjawab pemerintah dalam mengelola pendidikan semakin berat. Sementara pemerintah sendiri kekurangan biaya untuk mengurus pendidikan. Hal ini nampak dari besarnya persentasi pendidikan terhadap PDB yang dialokasikan untuk pendidikan.³³ Jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia maka kemampuan Pemerintah Indonesia untuk membiayai pendidikan sangat minim, hanya 1,4 persen.³⁴ Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tentu patut diperhatikan karena selama ini dapat membiayai pendidikan secara mandiri walaupun sebenarnya negara mempunyai kewajiban untuk membantu madrasah. Wajar jikalau kemudian kualitas pendidikan di madrasah masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Terbatasnya sumberdaya manusia dan minimnya sarana pendukung

³³Soedijarto, *Landasan dan Arah*, 82.

³⁴Bandingkan dengan negara-negara berikut: Vietnam 2,8, Sri Lanka 3,4, Filipina 3,4, Brunai 4,4, Thailand 5,0, India 5,1, Malaysia 5,2, Korea Selatan 5,3 Jepang 7,3 persen.

kegiatan pembelajaran telah menjadi bagian persoalan yang akrab dengan kondisi madrasah.

Indikator yang keempat dari perkembangan sistem pendidikan nasional adalah politisasi pendidikan. Selama kurun pemerintahan Orde baru, pendidikan telah dijadikan sebagai alat untuk mengendalikan kekuasaan. Sehingga pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara sentralistik, mengabdikan kepada kekuasaan, dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Sakralisasi ideologi negara dijadikan sebagai alat untuk mengekang lahirnya pemikiran kritis yang menjadi tujuan utama pendidikan. Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional juga terkena dampak dari adanya politisasi pendidikan. Hal ini nampak dari adanya indoktrinasi P-4 yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk madrasah.

PENGEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

Globalisasi merupakan sebuah gerakan dunia yang menghadirkan 2 sisi yang berbeda tetapi saling mempunyai keterkaitan, sebagaimana 2 sisi mata uang yang saling berhubungan. Di satu sisi, globalisasi telah menghadirkan pemikiran yang mengarahkan dunia menjadi semakin seragam dan terstandar melalui penyesuaian kebudayaan, teknologi, dan perdagangan, yang berasal dari dunia Barat. Tetapi di sisi lain globalisasi meningkatkan sensitifitas terhadap perbedaan budaya antar bangsa. Globalisasi berkaitan erat dengan modernisasi, yang dalam perkembangannya telah melahirkan efek-efek positif, misalnya rasionalisasi, standarisasi dan kontrol, namun demikian modernisasi juga melahirkan efek-efek negatif, misalnya alienasi, ketidakpuasaan, ketidakstabilan atau perubahan yang terjadi secara terus-menerus.

Dalam sebuah artikel yang sangat populer, Samuel Huntington menjelaskan adanya *Clash of civilization*. Dalam sebuah *paper* yang kontroversial tersebut Huntington berargumen bahwa aspek terpenting dalam politik global yang akan terjadi dalam waktu dekat adalah benturan peradaban. Dengan berakhirnya perang dingin, politik internasional akan meninggalkan fase Barat-nya, dan pusat perhatian berpindah menjadi

interaksi antara peradaban Barat dan non Barat dan antar peradaban non-Barat.

Suka atau tidak, kekuatan globalisasi memang telah merangsek dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, dimanapun masyarakat itu berada, termasuk di Indonesia. Penggunaan teknologi “kotak” (handphone, televisi, internet, dan lain sebagainya) menjadikan dunia sangat sempit. Orang dalam hitungan detik dapat melakukan perubahan atau berubah mempengaruhi orang lain, karena pengaruh teknologi komunikasi yang begitu dahsyat. Menurut Imam Barnadib³⁵ dengan perkembangan informasi yang disebarkan melalui penyebaran informasi yang beraneka ragam, seolah-olah manusia “kebanjiran” berbagai informasi, seperti ilmu pengetahuan, iklan-iklan, baik barang maupun hiburan, maka tugas pendidikan adalah menyiapkan peserta didik bukan sekedar sebagai “penerima” informasi tetapi juga “penyeleksi” informasi. Globalisasi dengan tema “modernitas” yang mengusung gaya hidup kapitalis dan liberalisasi ekonomi menggiring munculnya semangat kompetisi sehingga memposisikan kelompok masyarakat lain sebagai kompetitor bukan sebagai relasi atau mitra kerjasama dalam menghadapi kehidupan.

Apa yang diprediksikan oleh Huntington tentang “benturan budaya” secara perlahan tetapi pasti telah terjadi. Benturan budaya antara budaya “inisiasi” globalisasi dalam hal ini dunia “Barat” dengan budaya lokal dimana masyarakat itu berada tidak dapat dihindari. Pendidikan sebagai bagian dari produk kebudayaan masyarakat juga tidak luput dari pengaruh globalisasi.

Sebagai negara berkembang, sistem pendidikan di Indonesia rawan dipengaruhi bangsa lain dan mengalami “benturan” ideologi. Menurut Imam Barnadib,³⁶ Indonesia sebagai negara berkembang berada pada simpang jalan pendidikan. Di satu pihak, tradisi, norma, nilai yang kuat dan mewarnai kehidupan perlu dipertahankan dan dikembangkan. Di pihak lain, hal-hal baru perlu diserap hingga menjadi bagian pendidikan. Di sinilah nampak “dilematika” bangsa yang terseret arus globalisasi sementara penghayatan dan penjiwaan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang

³⁵Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Adicita, 2002), 40.

³⁶Imam Barnadib, *Dasar-dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Pendidikan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1996), 50.

merdeka terhadap ideologinya sendiri yakni Pancasila masuk dalam kategori yang “memprihatinkan”. Padahal dengan jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Mensiasati situasi yang demikian, apa yang diperlukan oleh sistem pendidikan Indonesia? Menurut Imam Barnadib³⁷ pendidikan di Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Karena Pancasila sebagai ideologi dan falsafah terbuka, maka nilai-nilai yang termuat dalam filsafat selain Pancasila yang memiliki relevansi dengan semangat Pancasila dapat diambil dan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebagai contoh adalah kecenderungan pendidikan di Indonesia yang berdimensi seumur hidup, semesta, menyeluruh dan terpadu. Sementara itu kecenderungan pendidikan di dunia mempunyai isu tentang pengembangan manusia yang berbudaya, memiliki ilmu pengetahuan dan profesional. Isu ini sejalan dengan gejala universal bahwa masyarakat selalu berubah dan berkembang. Maka meminjam istilah Imam Barnadib,³⁸ agar sistem pendidikan nasional dapat mengikuti perkembangan globalisasi yang tidak dapat dihindari, maka pola pikir yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional adalah *eklektif inkorporasi* yang berarti menjadikan Pancasila sebagai penyaring budaya, falsafat maupun ideologi di luar sistem pendidikan nasional yang sedang berjalan saat ini. Oleh karena itu masyarakat modern Indonesia yang sedang timbul, perlu membuat perspektif baru tentang pendidikan di Indonesia yang dapat dilandasi oleh tinjauan kritis dengan menemukan kongruensi teori sumberdaya manusia, revitalisasi dan rekonstruksionisme. Sehingga pada gilirannya sistem pendidikan Indonesia tidak menghasilkan lulusan yang teralinesasi dari sistem kehidupan global tetapi dapat melahirkan peserta didik yang memiliki kepribadian dan jati diri sebagai warga masyarakat Indonesia dan dapat berperan serta dalam tatanan kehidupan global.

³⁷*Ibid.*, 52.

³⁸Barnadib, *Dasar-Dasar*, 49.

Paradigma di atas tentu juga berlaku pada sistem pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional Indonesia. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia saat ini, khususnya krisis moral dan mental menjadi poin penting dan keprihatinan bersama, terlebih ketika globalisasi menuntut adanya pembangunan karakter yang kuat. Bangsa yang lemah hanya akan menjadi sasaran empuk imperialisme modern dengan berbagai produknya baik ekonomi, politik, budaya maupun ideologi.

Sistem pendidikan Islam mestinya mulai menata diri bagaimana menghadapi globalisasi yang menghadirkan 2 sisi negatif dan positif. Di antara upaya tersebut adalah memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas proses, memperbaiki manajemen dan mereformasi paradigma pendidikan yang berkembang saat ini dengan paradigma organik. Menurut Zamroni³⁹ paradigma organik bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh: kemampuan intelektual, personal dan sosial. Institusi pendidikan merupakan gabungan berbagai interaksi baik akademik maupun non-akademik semua warga sekolah. Semua anggota sekolah menjadi pembelajar, guru belajar bagaimana melayani murid dengan baik, pimpinan belajar bagaimana mengelola keutuhan antar guru, belajar mensinergikan segala potensi yang dimiliki lembaga. Institusi pendidikan ditempatkan sebagai jaringan sosial bukan individual, sehingga dapat melahirkan energi dan kekuatan yang berpengaruh pada mutu pendidikan.

Implementasi paradigma organik di madrasah sebagai sistem pendidikan Islam tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah, tetapi memerlukan pengembangan pemikiran yang utuh dan aksi nyata secara bertahap dan sistemik. Meminjam istilah yang digunakan oleh sistem penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009, madrasah perlu melakukan evaluasi diri secara jujur dan bertanggungjawab mengenai kondisi riil yang sedang terjadi saat sekarang. Hal ini diperlukan sebagai strategi untuk mengumpulkan, mengalisis, melaporkan kinerja dan memetakan mutu tenaga kependidikan, program kegiatan dan mutu madrasah secara

³⁹Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi*, 96.

holistik,⁴⁰ dengan menggunakan instrumen indikator standar pelayanan minimal (SPM)⁴¹ yang berjumlah 13 indikator dan standar nasional pendidikan (SNP) yang terdiri dari delapan standar.⁴²

Dengan melakukan evaluasi diri madrasah⁴³ yang jujur dan bertanggung jawab, diharapkan madrasah dapat memetakan berbagai masalah yang dihadapinya, dan pada fase berikutnya madrasah dapat melakukan perbaikan mutu berdasarkan problem yang dihadapinya melalui rencana kegiatan madrasah, dengan menggunakan skala prioritas. Dengan skala prioritas yang telah disusun diharapkan secara bertahap problem yang dihadapi madrasah dapat diperbaiki. Oleh karena itu untuk menyusun evaluasi diri madrasah (EDM) yang baik perlu dilakukan dalam lingkup internal madrasah dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan dilaksanakan oleh tim pengembang madrasah yang terdiri dari unsur kepala madrasah, wakil unsur guru, wakil komite madrasah, wakil orang tua siswa, dan pengawas madrasah.

Proses evaluasi diri madrasah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan pembentukan tim pengembang madrasah, pelatihan penggunaan instrumen evaluasi diri madrasah, pelaksanaan evaluasi diri madrasah di madrasah dan penggunaan evaluasi diri madrasah sebagai acuan penyusunan RKM (rencana kegiatan madrasah) dan RAPBM (rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah). Evaluasi diri madrasah (EDM) sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam tata kelola lembaga pendidikan, namun demikian sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009, Evaluasi diri madrasah merupakan

⁴⁰Kementerian Pendidikan Nasional & Kementerian Agama RI, *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/ Madrasah* (Jakarta: Dikdasmen & Direktorat Pendis, 2009), 21.

⁴¹Standar pelayanan minimal pada konteks ini berfungsi untuk mengatur apa yang harus tersedia di madrasah dan apa yang harus terjadi di madrasah. Oleh karena itu SPM difokuskan untuk memastikan bahwa setiap madrasah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik.

⁴²Standar Nasional Pendidikan, meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan dan standar penilaian.

⁴³Di dalam EDM (Evaluasi Diri Madrasah) terdapat dua puluh enam komponen dan enam puluh dua indikator sebagai tolok ukur untuk menggambarkan kondisi madrasah secara utu

salah satu komponen sumber data dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.

PENUTUP

Sistem pendidikan Islam Indonesia sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, dihadapkan kepada berbagai kenyataan bahwa secara historis kelahirannya merupakan respons yang tumbuh dan berkembang dari aspirasi masyarakat muslim yang mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda. Dalam suasana yang represif sistem pendidikan Islam Indonesia justru tumbuh dan berkembang dengan subur, bak jamur yang tumbuh di musim penghujan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni pemerintahan kolonial Belanda.

Namun demikian, seiring dengan perjalanan pembangunan bangsa Indonesia yang merdeka, keberadaan sistem pendidikan Islam Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain: pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam sampai pada persoalan tata kelola madrasah yang terkesan semrawut. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sosial, memaksa madrasah harus tetap eksis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang telah dirintis oleh para ulama sebagai pendiri madrasah. Dalam suasana yang demikian tentu madrasah harus mengubah paradigma sebagai lembaga pendidikan yang “liar” sebagaimana label tersebut pernah diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi lembaga pendidikan yang mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan Islam Indonesia telah menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

DAFTAR RUJUKAN

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputat: Logos, 2000.
- Azra, Azyumardi. "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan" dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- A. Steenbrink, Karel. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Barnadib, Imam. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Adicita, 2002.
- Barnadib, Imam. *Dasar-Dasar Kependidikan: Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Pendidikan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 1996.
- Buchori, Mochtar. "Posisi dan Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Umum," *Makalah: Seminar Nasional*. IKIP Malang, 24 Februari, 1992.
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Drewes, G.W.J.. *An Early Javanese Code of Muslim Ethics*. The Hague: KITL V Nijhoff Bibliotheca Indonesia, 1978.
- Kementerian Pendidikan Nasional & Kementerian Agama RI. *Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Dikdasmen& Direktorat Pendis, 2009.
- Maftuh Basuni, Muhammad. "Pendidikan Agama Belum Capai Tujuan," *Tempo*, 24 November 2004.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Malik Fadjar, A. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mas'ud, Abdurrahman. "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. ed. Ismail SM, et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mochtar, Affandi. *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*. Ciputat: Kalimah, 2001.

- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: LeKDiS. 2005.
- Sairin, Sjafrin. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Suroso, Djarot S. *Pendidikan Nasional di Indonesia*. <http://www.scrib.com/doc/6480664/Globalisasi-Pendidikan#>
- Suyanto. *Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Komite Reformasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Syukur, Fatah. "Madrasah di Indonesia: Dinamika, Kontinuitas dan Problematika" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. ed. Ismail SM., et al. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Bandung: Rineka Cipta, 2004.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Bandung: Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Wahid, Abdul. "Manajemen Berbasis Madrasah: Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. ed Ismail SM et.al Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Zamroni. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi:Prakondisi menuju era Globalisasi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

